

PROGRESS QUICK WIN PEMERINTAH PROVINSI BALI 2019-2021

NO	TAHUN	QUICK WIN	PENJELASAN	AREA	LEADING SECTOR	PROGRESS (PERKEMBANGAN)	MANFAAT
A. QUICK WIN TAHUN 2021							
1	2021	Penerapan Bali Media Centre	Aplikasi Bali Media Centre merupakan aplikasi yang memuat Portal Berita berbasis crowd sourcing, Konsultasi/Pengaduan, Kontak dan Informasi Publik lainnya;	Pelayanan Publik	Diskominfo	-Portal Berita pada Bali Media Centre telah terintegrasi dengan website masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja, berita yang diunggah pada BMC akan terbit juga pada website masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja -Pengaduan/Konsultasi dilakukan dengan berbagai macam kategori/kanal pengaduan -Aplikasi BMC Mobile telah terintegrasi dengan Aplikasi Absensi Pegawai dimana setiap pegawai dapat melakukan share berita sebelum melakukan absen.	-Tersedianya Portal Berita Provinsi Bali yang terpusat -Pengaduan/konsultasi publik dengan berbagai tipe Pengaduan/kanal -Kontak penting yang dapat dihubungi -Informasi publik Lainnya
2	2021	Penerapan Portal Bali Satu Data	Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Bali atau Portal Bali Satu Data merupakan bentuk kebijakan tata kelola data di Pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, terintegrasi dan dapat dibagikan antar Instansi di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali. Kebijakan ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali tentang Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Bali. Melalui SDI Provinsi Bali, seluruh data Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali (https://balisatudata.baliprov.go.id). Selanjutnya, terintegrasi ke tingkat Nasional dengan Satu Data Indonesia (https://data.go.id/).	Ketatalaksanaan	Diskominfo	-Portal Bali Satu Data terintegrasi dengan beberapa Sistem melalui API untuk menampilkan data, termasuk dengan Sistem Data Sektoral (sebagaimana format laporan dalam Buku Bali Membangun) -Portal Bali Satu Data menampilkan data CCTV secara Realtime -Portal Bali Satu Data menampilkan data dengan tipe data yang diupdate harian, mingguan dan bulanan -Portal Bali Satu Data yang menampilkan data berbasis dokumen -Portal Bali Satu Data, dimana data didalamnya dapat dikategorikan berbasis publik atau private -Portal Bali Satu Data dengan jenis laporan dapat berbasis wilayah, subyek, perangkat daerah terkait dan sejenisnya	-Tersedianya data Bali dalam Satu Portal. -Menemukan data lebih mudah dan cepat
3	2021	Penerapan Pameran Virtual Pembangunan Bali	Aplikasi Pameran Virtual Pembangunan merupakan sistem Virtual Reality yang berbasis web dengan menampilkan konten-konten pameran yang terdapat pada stand-stand yang telah disediakan.	Pelayanan Publik	Diskominfo	-Pengembangan standar bentuk stand -Pengembangan standar konten tiap stand	Menyediakan konten-konten pameran secara virtual untuk mendukung kegiatan pada masa pandemi dengan mengurangi Kontak langsung, diantaranya meliputi leaflet, foto, video dan deskripsi
4	2021	Penerapan Aplikasi ANJAB-ABK	Aplikasi Anjab ABK untuk mempermudah dan memperjelas penerapan Anjab ABK di Provinsi Bali	Kelembagaan Manajemen SDM	Biro Organisasi	Pelaksanaan Anjab ABK telah dilaksanakan tahun 2019 dan diintegrasikan ditahun 2021 serta ditambahkan fitur SKJ	Tersedianya Informasi Jabatan, peta Jabatan dan formasi jabatan. Serta dilanjutkan dengan evaluasi jabatan menghasilkan penetapan nilai dan kelas jabatan serta dari informasi jabatan ditarik standar kompetensi jabatan.
5	2021	Penerapan aplikasi Simonev Reform	Aplikasi berbasis web untuk melaksanakan proses monev RB bagi Perangkat daerah secara cepat, mudah dan transparan	Manajemen Perubahan	Biro Organisasi	Dalam tahap pembangunan dan akan diimplementasikan pada monev RB PD semester I tahun 2021	- Proses monev lebih cepat, mudah dan efisien - data monev RB terkelola dengan baik - menyajikan Profil RB Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat perkembangan RB di PD

NO	TAHUN	QUICK WIN	PENJELASAN	AREA	LEADING SECTOR	PROGRESS (PERKEMBANGAN)	MANFAAT
6	2021	Penerapan E-BUSER (Buletin Sat Kerthi)	Buletin Reformasi Birokrasi yang disebarluaskan secara online tiap triwulan. Distribusi E-Buser kepada para pegawai Pemerintah Provinsi Bali	Manajemen Perubahan	Biro Organisasi	Telah berjalan dari tahun 2021 dan telah mengeluarkan 2 edisi (triwulanan). Bahan E-Buser sebagian besar berasal dari Agen Perubahan yang ada di Perangkat Daerah	- Media penyebaran informasi secara internal tentang reformasi birokrasi - meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap RB sehingga menurunkan resistensi terhadap RB - mengajak pegawai untuk merubah pola pikir dan budaya kerja yang baik
7	2021	E-Katalog Lokal	Penayangan komoditas kebutuhan rutin Pemerintah Provinsi Bali dalam Sistem E-Katalog (e-katalog.lkpp.go.id) yang memuat daftar, merek, jenis spesifikasi teknis, harga, dan jumlah ketersediaan barang/jasa. Transaksi dilakukan secara e-purchasing sebagai upaya dalam penyederhanaan proses PBJ sesuai regulasi, prinsip dan setika PBJ	Ketatalaksanaan	Biro PBJ	Saat ini sudah terdapat 2 (dua) jenis komoditas dalam e-katalog lokal Provinsi Bali yaitu jasa tenaga keamanan dan makanan & minuman. Sedangkan 3 (tiga) komoditas sedang dalam proses pengadaan/tayang yaitu aspal/readymix, Sewa Tenda dan Jasa Cleaning Service pada Rumah Sakit	(1) E-Katalog merupakan media atau sarana pemanfaatan teknologi informasi yang menghubungkan para pelaku pengadaan secara online untuk mendapatkan nilai tambah, meningkatkan transparansi, mempermudah proses dan tata kelola pengadaan yang lebih baik; (2) Suatu bentuk percepatan pengadaan barang/jasa untuk menyederhanakan proses pengadaan barang/jasa dengan melakukan efisiensi biaya
8	2021	Penerapan Aplikasi SIKI	Aplikasi berbasis WEB untuk pelayanan informasi publik	Ketatalaksanaan	Diskominfo	SIKI sudah diimplementasikan, dan di tahun 2021 terintegrasi dengan Kab/Kota	Memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi
9	2021	Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB)	ASB adalah regulasi standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dalam penentuan besaran anggaran. ASB merupakan instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja.	Akuntabilitas Kinerja	Bappeda	Telah diterapkan dalam penyusunan APBD Tahun 2020 dan 2021	1. Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan tolok ukur kinerja yang jelas; 2. Meminimalisir pemborosan anggaran; dan 3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penganggaran
10	2021	Penerapan Aplikasi Si Peny Dewa Gita	Aplikasi berbasis web untuk mengawasi progres penyusunan Ranperkada serta untuk mengetahui jumlah Ranperkada yang diajukan dari Kabupaten/Kota	Deregulasi Kebijakan	Biro Hukum	Dalam tahap pengembangan dan akan di implementasikan pada movev RB pada semester II tahun 2021	- Mempermudah pengawasan progres penyusunan Ranperkada Kab/Kota - Memudahkan dalam mendata jumlah Ranperkada Kab/Kota - Mengetahui jumlah ranperkada dalam proses fasilitasi - Mengetahui Ranperkada yang mendekati deadline proses
11	2021	Penerapan Aplikasi BUMDES	Aplikasi samsat Layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Melalui Badan Usaha Milik Desa	Pelayanan Publik	Bapenda	Terbentuknya SK Kepala Badan dan SOP tentang Layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Melalui Badan Usaha Milik Desa	Pembayaran Samsat bisa melalui Bumdes
12	2021	Penerapan Aplikasi LPD Berbudaya	Aplikasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap melalui Lembaga Perkreditan Desa Berbudaya	Pelayanan Publik	Bapenda	Terbentuknya SK Kepala Badan dan SOP tentang Layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Lembaga Perkreditan Desa Berbudaya	Pembayaran Samsat bisa melalui LPD (ubung dan kesiman)
13	2021	Penerapan Aplikasi VAST	Aplikasi Pembayaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Era Baru Melalui Virtual Account	Pelayanan Publik	Bapenda	Terbentuknya SK Kepala Badan dan SOP tentang Pembayaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Era Baru Melalui Virtual Account	Pembayaran Samsat bisa dilakukan secara non tunai

NO	TAHUN	QUICK WIN	PENJELASAN	AREA	LEADING SECTOR	PROGRESS (PERKEMBANGAN)	MANFAAT
14	2021	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (https://jdih.baliprov.go.id/)	Sistem Informasi berbasis Website yang digunakan untuk memberikan layanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Informasi yang dikelola JDIH Provinsi Bali meliputi : Peraturan Perundang-undangan, Monografi Hukum, Artikel Hukum dan Putusan Pengadilan.	Deregulasi Kebijakan	Biro Hukum	Pada Tahun 2020 JDIH mengalami perkembangan, yaitu penambahan fitur berupa : 1. Perubahan antar muka. 2. Penambahan laman untuk produk hukum berupa monografi hukum, artikel hukum dan putusan pengadilan. 3. Penambahan statistik perbandingan jumlah peraturan perundang-undangan. 4. Penambahan fitur share ke media sosial. 5. Penambahan laman media YouTube. 6. Penambahan laman unduh dokumen. 7. Penambahan fitur pendaftaran anggota JDIH melalui akun Google atau Facebook. 8. Penambahan fitur permintaan menjadi anggota JDIH pada saat mengunduh dokumen produk hukum. 9. Penambahan fitur survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan JDIH.	a. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya; b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; c. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
15	2021	Sitem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)	Aplikasi SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) merupakan aplikasi antar-muka yang dapat digunakan oleh Simpul Jaringan memasukkan informasi kearsipan untuk selanjutnya dipublikasikan pada website JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN). Aplikasi ini dapat juga digunakan oleh Simpul Jaringan mengolah informasi kearsipan yang dimiliki dalam rangka membantu temu balik baik dalam format digital maupun lokasi fisik arsip di tempat penyimpanannya. Pencarian informasi kearsipan dapat dilakukan dengan berbagai kategori, meliputi: deskripsi arsip, pencipta arsip, fungsi, repositori (tempat penyimpanan), subjek, tempat, serta objek digitalnya.	Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Pepustakaan	Pelaksanaan telah dilakukan tahun 2021 dengan melakukan pengunggahan daftar arsip statis Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 119 item, yang selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat umum.	1. Kemudahan bagi setiap instansi melalui e-records dan e-archive dalam memberikan layanan informasi kearsipan kepada masyarakat melalui website JIKN sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2. Kemudahan setiap instansi dalam menghimpun data dan informasi kearsipan melalui e-records dan e-arhives menjadi informasi kearsipan nasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen pemerintah dan pembangunan, serta sebagai memori kolektif bangsa, 3. Kemudahan bagi setiap instansi dalam mengidentifikasi dan memperoleh arsip yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas secara cepat, tepat, mudah, dan murah, 4. Di samping itu, fasilitas penyimpanan arsip online pada SIKN dapat dimanfaatkan untuk mem-backup
16	2021	Pustaka Ambaralaya (portal e-book)	merupakan aplikasi yang dibuat dinas kearsipan dan perpustakaan provinsi bali untuk mewadahi dan melayani koleksi buku digital kepada masyarakat	Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Pepustakaan	Sudah dapat diunduh melalui playstore dan appstore pada perangkat pengguna, dimana di dalam aplikasi ini sudah berisikan kurang lebih 3000 koleksi buku digital yang dapat diakses oleh masyarakat.	Para pemustaka dapat dengan mudah mengakses jenis buku yang ingin dibaca dari manapun berada, pada kondisi pandemi para pemustaka tidak kehilangan kesempatan untuk membaca buku koleksi perpustakaan.

NO	TAHUN	QUICK WIN	PENJELASAN	AREA	LEADING SECTOR	PROGRESS (PERKEMBANGAN)	MANFAAT
17	2021	Pustaka Bali (inlisite)	Pustaka Bali dibangun dalam rangka menghimpun koleksi konvensional perpustakaan dalam bentuk Perpustakaan Digital, disamping membantu upaya pengembangan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di seluruh Indonesia yang didasarkan pada : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam	Pelayanan Publik	Dinas Kearsipan dan Pepustakaan	Saat ini Pustaka Bali sudah berisikan informasi koleksi perpustakaan sebanyak hampir 44.000 koleksi konvensional perpustakaan yang terdapat di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali. Selanjutnya dengan aplikasi ini pemustaka dapat mencari dan meminjam koleksi secara digital.	<ul style="list-style-type: none"> Membantu pengembangan otomasi perpustakaan di provinsi bali Sebagai tool perpustakaan digital untuk mengelola koleksi full teks dan multimedia Membantu dalam pembentukan katalog elektronik berbasis MARC untuk Indonesia (INDOMARC). Melaksanakan program nasional yang diamanatkan kepada Perpustakaan Nasional untuk menghimpun data koleksi nasional dalam sebuah Katalog Induk Nasional (KIN) dan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Membantu pembentukan Katalog Induk Daerah (KID) dan Bibliografi Daerah (BiD) yang
18	2021	Gema Jiwa Shanti	Gema Jiwa Shanti merupakan sebuah program penyebaran informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa audio visual yang dirancang memanfaatkan media internet dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan tujuan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi tentang kesehatan jiwa.	Pelayanan Publik	RSJ Bali	Pada awalnya kegiatan Gema Jiwa Shanti dilaksanakan setiap hari Kamis seminggu sekali, tetapi sejak April 2021 kegiatan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali setiap hari Kamis. Kegiatan ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat luas yang ingin memperoleh informasi seputar kesehatan jiwa. Diperlukan upaya sosialisasi secara masif dan juga dukungan semua pihak untuk dapat mempromosikan kegiatan ini	Masyarakat memperoleh tambahan informasi yang terbaru dan dapat dipercaya tentang kesehatan jiwa

B. QUICK WIN TAHUN 2020

1	2020	Penyederhanaan Birokrasi (Quick Win WAJIB dr PUSAT tahun 2020)	Pengalihan jabatan struktural ke fungsional	Kelembagaan	Biro Organisasi	masih tahap pemetaan data jabatan pengawas (eselon 4) pada perangkat daerah yang menangani perijinan, penerbitan rekomtek perijinan, investasi dan pelayanan publik	tersedianya data jabatan pengawas (eselon 4) yang menangani perijinan, penerbitan rekomtek Perijinan, investasi dan pelayanan publik
2	2020	Penerapan E-Office https://eoffice.baliprov.go.id/	Penerapan persuratan secara elektronik	Ketatalaksanaan	Diskominfo	Layanan e-office telah berjalan sejak bulan Maret 2020. Sistem e-office diantaranya meliputi penanganan surat masuk, draft/surat keluar, disposisi, arsip elektronik, pencarian/filter arsip elektronik dan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, termasuk telah terintegrasi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang diterbitkan oleh BSrE dan terintegrasi dengan notifikasi email @baliprov.go.id. Saat ini masih dalam proses integrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian dan Layanan Single Sign On (SSO).	Proses persuratan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali menjadi efektif, efisien, <i>paperless, anytime, anywhere</i> dengan tersedianya layanan surat elektronik, fasilitas arsip digital dan terintegrasi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan notifikasi email @baliprov.go.id.

NO	TAHUN	QUICK WIN	PENJELASAN	AREA	LEADING SECTOR	PROGRESS (PERKEMBANGAN)	MANFAAT
3	2020	Penerapan E-Marketplace	Pengadaan barang dan jasa dibawah 50 juta rupiah yang bisa ditransaksikan secara elektronik melalui Mbizmarket	Ketatalaksanaan	Biro Pengadaan Barang Jasa Setda	Pengembangan E-Marketplace bekerjasama dengan Mbizmarket untuk Pengadaan dibawah 50 Juta telah dilakukan transaksi perdana pada Tanggal 7 Agustus 2020. Saat ini telah terdaftar 369 vendor, 4.930 produk dan 143 transaksi dengan nilai total transaksi sebesar Rp. 382.296.300,-	(1) Dokumentasi administrasi proses pengadaan akan terekam secara elektronik, sehingga proses akan akuntabel dan sesuai dengan prosedur karena di paksa oleh system; (2) memberikan kesempatan dan kemudahan para pelaku usaha khususnya UMKM untuk bertansaksi dengan Pemerintah
4	2020	Integrasi Perencanaan dan Penganggaran	Mengintegrasikan sistem perencanaan dan sistem penganggaran	Akuntabilitas Kinerja	Bappeda	Tahun 2020 telah mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang diwajibkan oleh Pemerintah Pusat.	1) Pemetaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 telah diinput dalam Modul Sistem Informasi Pembangunan Daerah pada Aplikasi SIPD. 2) APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 yang disusun melalui Modul Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Aplikasi SIPD.
5	2020	Coaching Online Pengelolaan RB	Pemberian coaching/bimtek secara daring terkait pengelolaan Reformasi Birokrasi	Manajemen Perubahan	Biro Organisasi	Dilakukan secara berkala dan berkesinambungan melalui daring terkait dengan teknis pengelolaan RB di Perangkat daerah. Kedepan akan dibuatkan video-video pembelajaran yang akan diupload di youtube channel	Meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah/Pegawai dalam pengelolaan RB yang lebih sistematis dan terstruktur
6	2020	Bincang Santai Agen Perubahan	Sharing informasi untuk perubahan pola pikir, sikap dan perilaku	Manajemen Perubahan	Biro Organisasi	Sebagai forum agen perubahan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan melalui daring dengan mengambil tema yang sedang hangat diperbincangkan. Diharapkan agen perubahan mendapatkan perspektif baru yang dapat merubah pola pikir, sikap dan perilaku	1) Meningkatnya pemahaman dan komitmen terhadap reformasi birokrasi 2) Terwujudnya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang baik bagi pegawai pemprov. Bali
7	2020	SIKA (Sistem Informasi Komunikasi Aparatur)	Aplikasi untuk penyampaian informasi dan komunikasi terkait dengan kegiatan pengembangan kompetensi baik itu pengembangan kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural	Sistem Manajemen SDM	BPSDM	Penambahan Menu pada SIKA meliputi: e-modul, e jadwal, e-panduan dan web data service sehingga total menu pada SIKA berjumlah 6 (enam). E-registration dikembangkan pada tahun 2017 – 2018, sedangkan e-coaching pada tahun 2019 namun diujicobakan setahun sebelumnya. Tahun 2021 telah direncanakan pengembangan aplikasi dengan menu yang lebih sederhana yaitu: pengembangan kompetensi mandiri (telah berjalan 60 %) diklat satu pintu serta menu pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BPSDM.	Standarisasi pengembangan SDM di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

NO	TAHUN	QUICK WIN	PENJELASAN	AREA	LEADING SECTOR	PROGRESS (PERKEMBANGAN)	MANFAAT
8	2020	Penerapan E-Perizinan https://eprizinan.baliprov.go.id/	Proses perizinan dilakukan secara elektronik	Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembangunan aplikasi e-Perizinan tahap I telah selesai untuk 22 jenis izin yang penerbitannya tidak membutuhkan rekomendasi teknis. Saat ini telah dapat melayani wajib izin secara online melalui alamat e-perizinan.baliprov.go.id.	Para wajib izin dapat mengurus izin yang dibutuhkan tanpa perlu sekalipun datang ke kantor DPMPSTP. Seluruh proses perizinan mulai dari layanan informasi, pengajuan dokumen, tracking hingga penerbitan izin ber-TTE dilakukan secara online. Hal tersebut secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat yang dapat dilihat dari nilai SKM yang naik sebanyak 2 poin lebih semenjak layanan e-Perizinan diluncurkan pada awal Maret 2020.

C. QUICK WIN TAHUN 2019

1	2019	Pemanfaatan BPD Payment untuk retribusi perizinan	Pembayaran retribusi perizinan melalui BPD Payment	Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sudah berjalan sejak 1 Februari 2019, masih digunakan sampai dengan hari ini.	Proses pembayaran retribusi IMTA tidak lagi dilakukan secara manual, dan wajib retribusi tidak perlu mendatangi DPMPSTP Provinsi Bali
2	2019	Siangsa (Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa)	Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa	Ketatalaksanaan	Biro Pengadaan Barang Jasa	SI-ANGSA telah menampilkan dashboard kinerja PBJ Pemerintah Provinsi Bali melalui interkoneksi database dengan SIRUP dan SPSE. Saat ini terus dilakukan penyempurnaan API (Application Programming Interface) agar data analytic sebagai dasar pengambilan kebijakan PBJ dapat berjalan optimal	(1) 1. Pengumuman RUP tepat waktu sebesar 100%; (2) Pemantauan Kinerja PBJ masing-masing OPD; (3) Tersedianya Informasi Kinerja Penyedia; (4) Terciptanya PBJ yang transparan, akuntabel serta persaingan pasar yang sehat dan kompetitif
3	2019	Sijapri (Sistem Informasi RSJ)	Sistem Informasi Rumah Sakit Jiwa	Pelayanan Publik	RSJ	SIJAPRI tetap dilaksanakan dan dikembangkan. Informasi publik seperti ketersediaan tempat tidur serta nama dokter tersedia setiap saat di layar pengumuman. Rencana akan terintegrasi dengan mobile JKN sehingga bisa dilihat juga oleh pengguna JKN	(1) Tidak ada komplain dari publik terkait ketersediaan tempat tidur, (2) Angka kepuasan pasien dan keluarga di bulan Maret 2020 87,87%, mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya Pebruari 86,41% (3) waktu tunggu rawat jalan 55,97 menit dari standar < 60 menit
4	2019	Siprima (Sistem pengendalian internal rumah sakit Mata)	Sistem Pengendalian Internal Rumah Sakit Mata	Pelayanan Publik	RSMBM	telah mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien dengan peningkatan upaya identifikasi keselamatan pasien sebesar 83,3% telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) - telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) - telah memiliki nilai RB tertinggi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam upaya pengendalian internal sehingga tercapai pelaksanaan proses manajemen resiko menuju Pelayanan Prima
5	2019	Pintu Baik (Program Internalisasi Umum dengan Berbicara Akuntabilitas, Integritas dan Kinerja)	Program internalisasi berbicara tentang Budaya Kerja, Budaya Pelayanan, Budaya Integritas dan Budaya dimana setiap pegawai berbicara 5 menit saat apel pagi	Manajemen Perubahan	Biro Organisasi	Karena adanya covid-19 dan kebijakan WFH maka PINTU BAIK tidak dapat dilaksanakan untuk mengurangi resiko terkena covid-19	- Meningkatnya komitmen pegawai melaksanakan Budaya Kerja - Meningkatnya kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi

NO	TAHUN	QUICK WIN	PENJELASAN	AREA	LEADING SECTOR	PROGRESS (PERKEMBANGAN)	MANFAAT
6	2019	Penerapan aplikasi Whistle Blowing System	Aplikasi pengaduan internal terkait whistle blowing system	Pengawasan	Inspektorat	WBS telah terintegrasi pada web Pemerintah Provinsi Bali	Tersedianya media pengaduan yang dapat melindungi identitas pelapor bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
7	2019	SAPA BKD (Sistem Administrasi Pelayanan Aparatur)	Aplikasi kepegawaian berbasis elektronik	Manajemen SDM	BKD	SAPA BKD sudah dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepegawaian kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Saat ini layanan telah di optimalisasi dalam penerapan PNS Online, SIMPEG, dan SIKEPO. Rencana kedepan Aplikasi SIMPEG, PNS Online, dan SIKEPO akan digabungkan kedalam satu aplikasi kepegawaian	Terwujudnya kepuasan pelayanan kepegawaian
8	2019	Sipeken Seni (Penyusunan Keputusan Gubernur Secara Elektronik) https://sipekensenibaliprov.go.id/	Aplikasi penyusunan Keputusan Gubernur secara elektronik	Hukum	Biro Hukum	Telah bersurat ke perangkat daerah untuk meminta nama admin penyusunan Keputusan Gubernur secara elektronik (sipeken seni), ada 2 (dua) perangkat daerah dari 38 PD yang belum mengirim nama adminnya untuk sipeken seni	Meningkatnya kualitas penyusunan Keputusan Gubernur